

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dampak

Dampak dapat didefinisikan sebagai imbas, pengaruh, perubahan, atau akibat yang dihasilkan dari pengimplementasian suatu program, aktivitas, ataupun kebijakan yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Dalam setiap keputusan maupun kebijakan yang diambil akan menimbulkan perubahan, entah itu berupa perubahan positif maupun negatif.

Menurut Waralah Rd Cristo (2008:12) dampak ialah sesuatu yang diakibatkan dari sesuatu yang dilakukan, dapat berbentuk positif ataupun negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.

2.2 Pengertian Pariwisata

Pariwisata memiliki keterkaitan dengan pengertian perjalanan wisata, yakni sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu selain di tempat ia tinggal, dilakukan secara singkat dan tidak bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. Kegiatan berwisata juga biasa disebut sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk mendapatkan kepuasan diri dan memenuhi keinginan untuk mengetahui sesuatu. Kata Pariwisata muncul dari bahasa Sanskerta yang mempunyai makna “Pari” yang berarti berulang-ulang dan “Wisata” yang mempunyai arti bepergian. sehingga dapat

dipahami bahwa pariwisata ialah sebuah kegiatan bepergian yang dilakukan lebih dari satu kali menuju suatu tempat.

Pendit (dalam Selviati 2020:5) dalam artian modern pariwisata merupakan gejala yang muncul pada saat ini yang didasari oleh kebutuhan manusia akan kesehatan dan pergantian suasana, penilaian terhadap pesona alam, kebahagiaan dan kenikmatan alam semesta, dan secara khusus diakibatkan oleh bertambahnya pergaulan dari berbagai bangsa dan kelas dalam masyarakat sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri dan perdagangan dan juga sebagai penyempurnaan alat-alat pengangkutan.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai jenis aktivitas wisata yang telah didukung oleh berbagai fasilitas dan juga layanan yang telah disediakan baik itu dari masyarakat setempat, pengusaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah.

2.3 Komponen Pariwisata

2.3.1 Wisatawan (*Tourist*)

Yoeti (dalam Suwerna dan Widyatmaja, 2017), wisatawan harus diartikan sebagai seseorang, tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa, dan agama, yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian yang lain daripada negara di mana orang itu biasanya tinggal dan berada di situ tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, di dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut, untuk tujuan non imigrasi yang legal,

seperti : perjalanan wisata, rekreasi, olah raga, kesehatan, alasan keluarga, studi, ibadah keagamaan, atau urusan usaha

Wisatawan (*Tourist*) adalah seseorang atau lebih yang melakukan sebuah perjalanan di luar rumahnya dengan tujuan untuk berekreasi tanpa niat untuk menetap dan dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Wisatawan merupakan konsumen atau pengguna dari suatu produk atau layanan. Rasa kepuasan yang dirasakan oleh wisatawan dapat diperoleh dari beberapa kegiatan yang dilakukan, dapat berupa menikmati keindahan alam, melihat keunikan budaya, kegiatan olahraga, ataupun mengikuti kegiatan seminar dan kegiatan lainnya.

2.3.2 Sarana Wisata

Menurut Suwardjoko dan Indira (dalam Marianti 2019:34) , sarana wisata adalah berbagai macam fasilitas yang disediakan dalam kegiatan kepariwisataan untuk memudahkan para wisatawan, seperti tempat tinggal, rumah makan, pusat belanja, biro perjalanan, lembaga keuangan, dan lainnya.

Sarana merupakan alat yang tercipta dari hasil buatan manusia demi menunjang dan mempermudah manusia dalam meraih tujuannya. Pada hakikatnya, sarana wisata menjadi media, alat dan juga teknologi yang akan menunjang usaha pariwisata. Sarana wisata menjadi pelengkap dari destinasi wisata yang berfungsi untuk menciptakan kenyamanan wisatawan selama berwisata. Pengembangan sarana wisata harus

menyesuaikan keperluan wisatawan, tak hanya itu selera pasar juga dapat menentukan sarana yang dibutuhkan.

2.3.3 Daya Tarik Wisata

Menurut Suwerna dan Widyatmaja (2017), daya tarik wisata merupakan unsur terkuat dalam sistem pariwisata, daya tarik wisata menjadi poin utama para pengunjung untuk datang dan berkunjung ke lokasi objek wisata.

Adanya daya tarik dari suatu objek wisata dapat dilihat dari unsur-unsur geografis dan juga potensi alam yang dimiliki baik yang muncul karena adanya proses alami maupun proses budaya. Objek wisata akan menciptakan daya tarik bagi wisatawan, sehingga daya tarik wisata dibagi menjadi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan, daya tarik wisata budaya, dan juga daya tarik wisata penyelenggaraan acara.

2.3.4 Jasa Wisata

Menurut Lupiyoadi (dalam Jericho 2017:11), jasa merupakan segala kegiatan ekonomi yang hasilnya tidak berbentuk dan hanya bisa dirasakan, keberadaannya akan memberikan nilai tambah (seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan, atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen).

Dengan adanya usaha jasa wisata, dapat menciptakan pergerakan pada perekonomian masyarakat yang dapat dirasakan saat ini maupun

dalam jangka waktu yang akan datang. Masyarakat dapat menawarkan jasa kepada para wisatawan agar perjalanan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar, dapat memenuhi kebutuhan akomodasi para wisatawan, menjelaskan tentang objek wisata yang dikunjungi, serta dapat memenuhi kebutuhan atraksi seni dan benda-benda seni dalam penyelenggaraan pertemuan.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat sebagai penjual jasa dapat menciptakan peluang untuk mendapatkan penghasilan, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Adanya kegiatan pariwisata akan memberikan kesempatan untuk bekerja bagi masyarakat sekitar objek wisata ataupun masyarakat luar, karena jenis jasa sangatlah beragam dan banyak jenisnya.

Berbagai bentuk jasa yang memiliki nilai jual adalah :

1. Jasa biro wisata
2. Jasa biro transportasi
3. Jasa perjalanan
4. Jasa penyedia cendramata
5. Jasa kuliner
6. Jasa penyedia akomodasi (*restaurant* dan hotel)
7. Jasa parmuwisata (*guide*)

2.3.5 Jenis-jenis Pariwisata

I ketut Suwerna dan I Gusti Ngurah Widyatmaja (2007) membagi pariwisata ke dalam beberapa jenis. Adanya pembagian pariwisata berdasarkan jenisnya bertujuan untuk merencanakan dan mengembangkan potensi pariwisata itu sendiri, sehingga jenis dan juga macam pariwisata

yang akan dikembangkan dapat dibangun sesuai dengan yang diinginkan.

Pariwisata dapat di bedakan ke dalam beberapa jenis antara lain :

1. Menurut letak geografis
2. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran
3. Menurut alasan atau tujuan perjalanan
4. Menurut objeknya
5. Menurut waktu berkunjung
6. Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan
7. Menurut alat transportasi yang digunakan
8. Menurut jenis kelamin
9. Menurut umur yang melakukan perjalanan
10. Menurut harga dan tingkat sosial

2.4 Pengembangan Pariwisata

Menurut Hasibuan (dalam Selviati 2020:14) Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai upaya dalam menyediakan dan meningkatkan fasilitas dan pelayanan demi memenuhi kebutuhan wisatawan.

Dengan adanya pengembangan pariwisata diharapkan dapat menghasilkan devisa untuk negara dan juga dapat menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan pariwisata dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Bila ditinjau dari segi perluasan peluang usaha dan juga peluang untuk bekerja, pengembangan pariwisata dapat memberikan dampak yang positif. Adanya kesempatan membuka usaha dan peluang pekerjaan muncul dipengaruhi oleh minat wisatawan yang berkunjung.

Pengembangan pariwisata memberikan dorongan dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan

permintaan baik itu berupa konsumsi maupun investasi yang pada akhirnya akan menciptakan kegiatan produksi barang maupun jasa.

2.5 Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 disebutkan bahwa infrastruktur merupakan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Prasarana menjadi kebutuhan pokok yang harus disediakan di setiap objek wisata, adanya prasarana juga dapat menjadi penunjang dalam pergerakan ekonomi. Berkembangnya suatu sektor pariwisata dapat dipengaruhi oleh pembangunan sarana atau infrastruktur yang ada. Infrastruktur memiliki tugas utama terhadap perkembangan di bidang wisata, karena dengan pembangunan infrastruktur yang baik, akan menunjang dalam berkembangnya sektor pariwisata.

Pembangunan yang dilakukan terhadap beberapa sektor tentu akan menimbulkan akibat, akibat yang ditimbulkan terbagi menjadi dampak positif ataupun dampak negatif. Tidak berbeda dengan pengembangan objek wisata, seluruh aktivitas pengembangan kepariwisataan yang dilaksanakan tentu akan memberikan dampak positif maupun negatif. Infrastruktur merupakan poin penting dalam proses memajukan pariwisata dan untuk mencapai keberhasilan dari suatu pembangunan, entah itu dalam bidang sosial ataupun

bidang ekonomi. Infrastruktur memiliki peran sebagai penghubung terhadap lingkungan yang berfungsi sebagai bagian utama, dengan struktur ekonomi sosial masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan faktor utama dalam mempercepat proses pembangunan regional maupun nasional, infrastruktur memiliki peran vital dalam menggerakkan peningkatan perekonomian. Tingkat perkembangan ekonomi dan penanaman modal tingkat daerah bahkan negara sangat dipengaruhi oleh tersedianya infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Hal ini lah yang menjadi penyebab pembangunan infrastruktur menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan bertambahnya infrastruktur dan perawatan yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi (Suratno.2010)

Pembangunan infrastruktur pariwisata daerah yang menjadi destinasi wisata ataupun objek wisata harus menyesuaikan keperluan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, infrastruktur pariwisata secara kuantitatif merujuk pada jumlah sarana dan prasarana yang harus disediakan adapun jika ditinjau secara kualitatif akan merujuk pada kualitas pelayanan yang diberikan dan kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan (Tri Risandewi 2017:108)

Pembangunan di sektor pariwisata perlu dilakukan secara berkala, hal ini ditujukan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan demi memperoleh kesejahteraan yang diharapkan. Pembangunan di sektor pariwisata dapat dilakukan dengan cara mengembangkan segala potensi yang dimiliki, dapat berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, jika dikelola dengan benar akan menghasilkan dampak yang positif terhadap semua.

2.6 Bentuk Pengembangan Wilayah

Adapun bentuk-bentuk pengembangan wilayah menurut Friedman dan Allonso (2008) adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya lokal, merupakan kekuatan alam yang dimiliki wilayah tersebut seperti lahan pertanian, hutan, bahan galian, tambang, dan sebagainya. Sumber daya lokal harus dikembangkan untuk dapat meningkatkan daya saing wilayah tersebut.
2. Pasar, merupakan tempat memasarkan produk yang dihasilkan suatu wilayah sehingga wilayah dapat berkembang.
3. Tenaga kerja, tenaga kerja berperan dalam pengembangan wilayah sebagai pengolah sumber daya yang ada.
4. investasi, semua kegiatan dalam pengembangan wilayah tidak terlepas dari adanya investasi modal, investasi akan masuk ke dalam suatu wilayah yang memiliki kondisi kondusif bagi penanaman modal.
5. Kemampuan pemerintah, pemerintah merupakan elemen pengaruh pengembangan wilayah yang efisien karena sifatnya sebagai katalisator pembangunan.
6. Transportasi dan Komunikasi, transportasi dan komunikasi berperan sebagai media pendukung yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Interaksi antara wilayah seperti aliran barang, jasa dan informasi akan sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya suatu wilayah.
7. Teknologi, kemampuan teknologi berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya wilayah melalui peningkatan output produksi dan keefektifan kinerja sektor -sektor perekonomian wilayah.

2.7 Faktor Pengembangan Wilayah

Menurut Lay (dalam Aditya Pula Nugraha 2012:96), “indikator yang mempengaruhi pengembangan wilayah berupa tingkat kesejahteraan pendidikan, pola penyebaran, dan konsentrasi investasi, serta ketersediaan prasarana.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator-indikator yang mempengaruhi pengembangan wilayah antara lain :

1. Fisik : Tersedianya sarana sosial ekonomi seperti sarana kesehatan, pendidikan dan sarana perekonomian.
2. Ekonomi : Kemampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari tingkat kesejahteraan keluarga pada masing-masing daerah.
3. Sosial : Jumlah penduduk dan kualitas penduduk.

2.8 Strategi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, beberapa pemikiran yang dapat dikembangkan untuk strategi pengembangan wilayah di masa mendatang antara lain adalah :

1. Alokasi sumber daya yang lebih seimbang. Berbagai deregulasi di sektor riil dan moneter telah dilakukan Pemerintah dalam rangka efisiensi di segala bidang. Namun dari berbagai studi yang dilakukan ternyata upaya tersebut masih cenderung menguntungkan Jawa dan kawasan-kawasan cepat berkembang lainnya. Seperti misalnya

penambahan infrastruktur besar-besaran dan pengembangan pertanian di wilayah padat penduduk seperti Jawa telah menarik investasi modal swasta, serta terjadinya peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen hanya di kawasan-kawasan tersebut. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah telah membuka kewenangan yang semakin besar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan menggunakan sumber-sumber keuangannya. Untuk itu, perlu pula dilakukan reformasi fiskal yang mendukung alokasi sumber daya yang lebih baik terutama ke kawasan-kawasan yang belum berkembang, termasuk diantaranya reformasi di bidang perpajakan. Deregulasi sektor riil juga perlu memperhatikan perkembangan kemampuan daerah.

2. Peningkatan sumber daya manusia di daerah Pembangunan selama ini telah menurunkan angka buta huruf, meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat di daerah. Namun demikian, kualitas manusia di kawasan-kawasan tertinggal umumnya masih di bawah rata-rata kualitas nasional. Untuk itu, pendekatan pembangunan sektoral yang telah meningkatkan standar kualitas manusia Indonesia sampai pada taraf tertentu, pada masa mendatang perlu diikuti oleh pendekatan pembangunan yang lebih memperhatikan kondisi dan aspirasi wilayah, bukan oleh pendekatan yang bersifat uniform. Strategi pembangunan manusia di masa mendatang harus mampu mengidentifikasi jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat menempatkan tenaga kerja dan

lulusan terdidik dalam pasar peluang kerja yang senantiasa menuntut adanya peningkatan keahlian.

3. Pengembangan kelembagaan dan aparat daerah Struktur kelembagaan dan aparat pemerintah daerah selama ini mencerminkan sistem pemerintahan berjenjang. Walaupun provinsi dan kabupaten juga berfungsi sebagai daerah otonom, yang mempunyai kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri, namun dalam berbagai implementasi pelaksanaan pembangunan selama ini daerah lebih kepada “menunggu” petunjuk dari pusat. Proses pengambilan keputusan yang demikian kemudian berkembang menjadikan aparat daerah lebih melayani aparat Pusat daripada melayani masyarakat daerahnya. Dalam era demokratisasi yang semakin berkembang seperti sekarang ini, yang ditunjang oleh berbagai peraturan perundangan mengenai desentralisasi yang lebih lengkap, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu melaksanakan kewenangan yang semakin besar dalam menata pembangunan daerahnya. Semakin lengkapnya perangkat peraturan dan perundang-undangan mengenai penataan ruang di setiap provinsi dan kabupaten/kota dapat menjadi acuan aparat daerah dalam mengelola berbagai unsur ruang (seperti sumber daya alam, manusia dan buatan) secara optimal, serta mengembangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan.
4. Pelayanan masyarakat yang efisien untuk kepentingan stabilitas ekonomi dan politik selama ini pemerintah memegang kendali yang

lebih besar terhadap sumber-sumber penerimaan dan berbagai kebijaksanaan pelayanan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan dasar masih sangat kurang, risiko investasi masih sangat besar, dan tingkat pendidikan rata-rata manusia di daerah masih rendah. Dengan semakin meningkatnya kemampuan kelembagaan dan kualitas aparat di daerah, sudah saatnya sekarang untuk memperbesar kewenangan daerah dalam menata pembangunan di daerah. Keterlibatan pihak swasta sebagai mitra kerja sekaligus sebagai pelaku pembangunan perlu diperbesar, sejalan dengan kewenangan daerah yang semakin besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya. Hal ini ditujukan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

2.9 Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain, *Pertama*, penelitian Suhendra Wijaya (2020) berjudul “Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Objek Wisata Desa Sekotong Barat”. Yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pembangunan infrastruktur pariwisata seperti jalan dan hotel memberi pengaruh dan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Sekotong Barat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditemukan, pengembangan infrastruktur jalan yang dilakukan disekitar kawasan objek

wisata Desa Sekotong Barat memberikan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, karena memudahkan akses jalan pendistribusian barang dan jasa. Kemudahan akses jalan menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat juga pelaku usaha sehingga terjadi kenaikan pendapatan. Pembangunan infrastruktur hotel di Desa Sekotong Barat mampu membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Persamaan penelitian oleh Suhendra Wijaya dan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ialah, adanya pembangunan infrastruktur pariwisata, keadaan sosial ekonomi masyarakat setelah dilakukan pengembangan wisata. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suhendra Wijaya dan penelitian yang akan dilakukan ialah , lokasi penelitian, waktu, dan tahun penelitian yang berbeda.

Kedua, penelitian oleh Selviati (2020), berjudul Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Lokasi Pemandian Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak pengembangan pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi Pemandian Eremerasa Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengembangan wisata Pemandian Eremerasa di Kabupaten Bantaeng menciptakan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat setempat. Dampak positif yang ditimbulkan pada aspek sosial ekonomi adalah

meningkatnya pendidikan keluarga responden, interaksi sosial antar masyarakat terjalin dengan baik, pengembangan pariwisata menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, serta terjadi peningkatan penghasilan masyarakat sebagai pelaku usaha. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pengembangan wisata adalah terjadinya perubahan sosial karena adanya pengaruh budaya luar, pencemaran lingkungan, dan kurangnya keamanan.

Persamaan penelitian oleh Selviati dan penelitian yang akan dilakukan ialah adanya pengembangan wisata, dan meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar objek wisata. Perbedaan penelitian yang dilakukan Selviati dan penelitian yang peneliti lakukan ialah, metode penelitian yang dipakai, tempat, waktu, dan tahun penelitian yang berbeda.

2.10 Kerangka Pikiran

Untuk memperjelas kerangka pemikiran penelitian ini, peneliti membuat skema pada gambar berikut :

Gambar 2.1

